



LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2021



DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KATA PENGANTAR

LAPORAN KINERJA (LKj) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 ini adalah penjabaran KINERJA dari *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)* Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021.

LAPORAN KINERJA (LKj) adalah gambaran Kinerja **Pembangunan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat** yang telah dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan tahunan yang dilaksanakan selama periode Januari – Desember Tahun 2021.

Tersusunnya LKj ini diharapkan akan terciptanya keterbukaan dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai perencanaan yang baik dan terarah dalam pembangunan Sektor **Perkebunan dan Peternakan** di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga pelaksanaannya dapat terintegrasi dengan sektor dan sub sektor lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, juga diharapkan akan mampu mengantisipasi dan menjawab tantangan **Dinamika Pembangunan Perkebunan dan Peternakan** dimasa mendatang serta mampu memenuhi kebutuhan perkembangan **IPTEK** dan **Isu Global** yang menjadi komitmen pembangunan nasional.

Kuala Tungkal, Januari 2022

Pt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Fauziah, S.Pt

Pembina Tk. I

NIP. 19680205 199703 2 003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi	3
1.3. Tugas dan Fungsi	6
1.4. Sumber Daya Manusia	6
1.5. Isu – isu Strategis	10
1.6. Maksud dan Tujuan	12
1.7. Sistematika Penulisan	13
BAB II Perencanaan Kinerja	
2.1. Rencana Strategis	15
2.2. Indikator Kinerja Utama	22
2.3. Rencana Kinerja Tahun 2021	24
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	26
BAB III Akuntabilitas Kinerja	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	30
3.2. Realisasi Anggaran	
BAB IV Penutup	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* (keperintahan yang baik) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 adalah: profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Adapun salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas untuk menuju "*good governance*" adalah menjalankan pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien terhadap pelaksanaan kebijakan program yang telah ditetapkan, serta menyampaikan laporan tepat waktu dan akurat yang disusun dengan mengikuti petunjuk yang berlaku, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk memberikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja yang disusun secara periodik.

Adapun tujuan pelaporan Kinerja adalah : (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; (2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 ini merupakan salah satu dari wujud akuntabilitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Agar suatu laporan pertanggungjawaban tersebut dapat diukur kinerjanya (*performance*-nya) secara lebih objektif baik dari aspek keluaran, hasil, manfaat maupun dampaknya, maka sejak awal pelaksanaan program/kegiatan tersebut perlu ditetapkan suatu instrumen tolok ukurnya, yakni dengan diterbitkannya dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) serta Perjanjian Kinerja (PK), yang didalamnya terdapat rincian indikator kinerja untuk diwujudkan selama tahun anggaran berjalan.

Terkait dengan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 ini, maka instrumen dokumen yang digunakan adalah: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016- 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2020, RKT serta Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

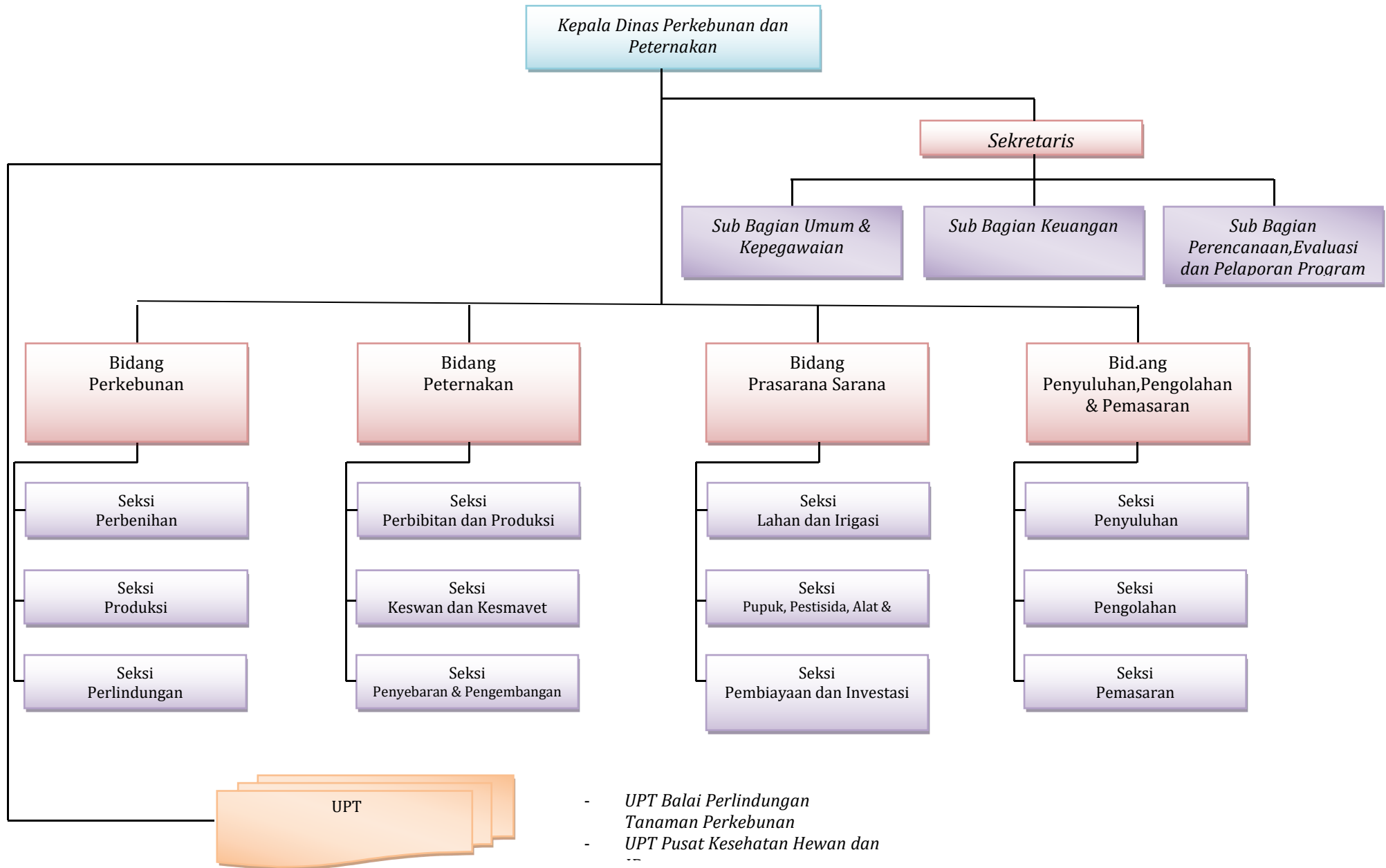
1. 1 (satu) orang Kepala Dinas
2. 1 (satu) orang Sekretaris
3. 4 (empat) orang Kepala Bidang
4. 15 (lima belas) orang Kepala Seksi

Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
- c. Bidang Perkebunan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Perbenihan
 2. Seksi Produksi
 3. Seksi Perlindungan
- d. Bidang Peternakan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Pembibitan dan Produksi.
 2. Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak
 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- e. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Lahan dan Irigasi.
 2. Seksi Pupuk Pesticida, Alat dan Mesin.
 3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
- f. Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Penyuluhan.
 2. Seksi Pengolahan.
 3. Seksi Pemasaran.

- g. **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT)**, terdiri dari :
1. UPT Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan
 2. UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lebih jelasnya Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada gambar dibawah berikut :



1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang menegaskan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah kabupaten di bidang Perkebunan dan Peternakan.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Menyusun rencana strategi dan akuntabilitas kinerja dinas;
- b. Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis dilingkungan dinas perkebunan dan Peternakan;
- c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup dinas;
- e. Membina **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**; dan
- f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

1.4. SUMBER DAYA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Sumber daya yang dimiliki Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah mencakup sumber daya aparatur, sarana prasarana yang dimiliki serta asset lainnya sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan Program dan Kegiatan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, melibatkan unsur aparatur

dengan jumlah, status dan kualifikasi sebagaimana diuraikan dalam tabel - tabel berikut ini :

Tabel 1.1. : Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Golongan Tahun 2021

No.	Golongan	Jumlah (orang)
1.	IV	6
2.	III	24
3.	II	4
4.	I	-

Tabel 1.2. : Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Alokasi Unit Kerja Tahun 2021

No.	Unit Kerja	PNS	TKK	JUMLAH
1.	Sekretariat	9	11	20
2.	Bidang Perkebunan	6	5	11
3.	Bidang Peternakan	9	7	16
4.	Bidang Prasarana dan Sarana	4	4	8
5.	Bidang Penyuluhan	4	4	8
6.	UPT Perlindungan Tanaman	1	3	4
7.	UPT Puskesmas dan IB	1	-	1
	JUMLAH	34	34	68

Tabel 1.3. : Jumlah Pegawai (ASN) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S2	1
2.	S1	24
3.	D3	1
4.	D2	-
5.	D1	-
6.	SLTA	8
7.	SLTP	-
8.	SD	-

Tabel 1.4. : Jumlah Pegawai (ASN) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Jabatan Tahun 2021

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
A.	Struktural	
	Eselon II.b	1
	Eselon III.a	1
	Eselon III.b	4
	Eselon IV.a	15
	Eselon IV.b	2
B.	Fungsional	
	Medik Veriner Muda	1
C.	Pelaksana	10
	JUMLAH	34

2. Kelembagaan

Pembangunan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejauh ini ditangani oleh berbagai kelembagaan formal maupun informal dengan peran dan fungsinya yang secara umum sudah terbagi secara proposional, meskipun demikian dari aspek teknis dan non teknis pelaksanaan fungsi dan peran kelembagaan tersebut belum dapat terfasilitasi secara optimal.

Aspek kelembagaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan penanganan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan perkebunan dan peternakan terutama sekali jika dikaitkan dengan kelembagaan formal sebagai pengawal kebijakan pembangunan perkebunan dan peternakan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan sub sektor perkebunan dan peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat disamping secara formal ditangani oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan juga banyak melibatkan peran dari lembaga formal maupun informal lainnya, antara lain :

- a. Lembaga Tingkat Pusat yang secara langsung maupun tidak langsung ikut berperan dalam proses pembangunan Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain yaitu Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat

- Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Medan, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, serta beberapa UPT Pusat yang secara khusus menangani komoditas tanaman perkebunan.
- b. Lembaga Tingkat Provinsi yang terkait dengan kebijakan pembangunan perkebunan dan peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baik langsung maupun tidak langsung antara lain yaitu Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan Provinsi Jambi, UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSBTP) Provinsi Jambi serta UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan (BPPBTP) Provinsi Jambi.
 - c. Organisasi /kelembagaan yang terkait dengan pembangunan perkebunan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain yaitu Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Asosiasi Petani Kelapa Indonesia, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Asosiasi Petani Karet Indonesia, Masyarakat Pencinta Indikasi Geografis (MPIG) Kopi dan Asosiasi Petani Rempah Indonesia.

3. Sarana dan Prasarana

Pembangunan Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejauh ini juga telah ditunjang oleh keberadaan sarana prasarana yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain berupa Kebun Percontohan Kopi Libtukom, Kebun Percontohan Kelapa Sawit, Kebun Pembibitan Kelapa Sawit, UPT Puskesmas dan IB, UPT Perlindungan Tanaman Perkebunan, Kandang Ternak di Bram Itam, Alat dan Mesin Pengolahan Hasil Perkebunan dan Peternakan serta Prasarana Budidaya (saluran Tata Air Mikro, Lantai Jemur Pinang dan Jalan Produksi).

Upaya penyediaan sarana prasarana perkebunan dan peternakan tersebut telah dilakukan melalui dukungan anggaran APBD maupun APBN yang bersifat stimulant untuk mendorong masyarakat/petani dalam

memfasilitasi kebutuhannya secara swadaya.

Adapun sarana prasarana aparatur yang mendukung aktivitas pokok dan secara langsung dikelola oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan serta merupakan aset dinas adalah sebagaimana yang tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.5. : Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung Kantor Dinas	1 unit	Baik
2.	UPT Perlindungan Perkebunan	1 unit	Sedang - Rusak
3.	UPT IB dan Puskeswan	1 unit	Baik
4.	Kebun Pembibitan Kelapa Sawit	1 unit	Baik
5.	Kebun Percontohan Kelapa Sawit	1 unit	Baik
6.	Kebun Percontohan Kopi Libtukom	1 unit	Baik
7.	Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	1 unit	Baik
8.	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat)	4 unit	Baik
9.	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua)	42 unit	Baik
10.	Kendaraan Roda 3 (Viar)	2 unit	Sedang - Rusak

1.5. ISU – ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis merupakan dinamika kehidupan lingkungan yang memiliki efek positif maupun negatif dalam cakupan pembangunan regional, nasional bahkan internasional. Selain berdasarkan cakupan kewilayahan, isu – isu strategis juga harus diperhatikan dalam kerangka series waktu yakni pemilahan isu – isu strategis yang sedang terjadi maupun isu – isu strategis yang akan terjadi sehingga status prioritas pada program pembangunan dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perkebunan dan

Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi Sumber Daya Manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas juga mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berbagai permasalahan yang muncul dalam pembangunan perkebunan dan peternakan yang masih menjadi kewenangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diinventarisasi dan dipetakan dalam suatu pohon masalah untuk pemahaman dalam penentuan kebijakan.

Pelaksanaan pembangunan Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan selama tahun 2021 dihadapkan kepada beberapa permasalahan aktual yang bersifat isu strategis sebagai berikut :

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bidang Perkebunan					
Produktivitas Komoditi Perkebunan	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditi Perkebunan : - Kelapa Sawit - Kelapa Dalam - Kopi - Pinang - Karet	Produktivitas Komoditi Perkebunan tahun sekarang dibagi produktivitas komoditi perkebunan tahun lalu	a. SDM Petugas Bidang Perkebunan b. Minimnya sarana dan prasarana pendukung perkebunan c. Ketersediaan bibit unggul pinang, kopi libtukom dan kelapa dalam d. Banyak tanaman tua/tanaman rusak	a. Pengetahuan petani yang masih rendah dalam penggunaan Teknologi Tepat Guna. b. Perubahan iklim dan bencana alam c. Masih tingginya serangan organisme penyakit tanaman dan gangguan usaha perkebunan d. Minimnya sarana dan prasarana serta informasi pasar yang dapat diakses oleh masyarakat perkebunan	a. Masih kurangnya anggaran yang langsung bersentuhan dengan petani b. Kurangnya pelatihan yang berkesinambunga n bagi tenaga teknis perkebunan c. Kurangnya SDM teknis d. Pengetahuan SDM Bidang Perkebunan dalam penguasaan teknologi untuk peningkatan mutu hasil perkebunan

				e. Tingkat sumber daya manusia sebagai pelaku usaha perkebunan dan agroindustri perkebunan yang masih rendah	
Bidang Peternakan					
Populasi ternak.	Populasi ternak : - Sapi - Kerbau - kambing - Domba - Unggas	Laju pertumbuhan populasi ternak sebesar 1,2 % per tahun	a. Masih perlunya peningkatan SDM Petugas peternak b. Masih adanya kematian pedet (anak sapi), abortus pada ternak dan interval kelahiran yang masih jauh c. Minimnya sarana dan prasarana d. Kurangnya tenaga medis dan paremedis e. Belum tersedianya HPT Unggul	a. Masih adanya pemotongan ternak betina produktif b. Sulitnya mencari bibit ternak yang berkualitas c. Masih adanya Pencurian ternak d. Masih adanya keluar masuk ternak yang tidak terdata	a. Kurangnya tenaga medis dan paramedis b. Kelembagaan dan SDM Peternak dan Tenaga Teknis c. Minimnya sarana dan prasarana pelayanan tekhnis

Permasalahan aktual tersebut selama kurun waktu tahun 2021 telah diupayakan untuk diatasi melalui berbagai langkah pelaksanaan Program/Kegiatan dari sumber anggaran APBD dan APBN, yang substansinya merupakan penjabaran dari arah kebijakan pembangunan sub sektor perkebunan dan peternakan sebagaimana telah dikemas di dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021.

1.6. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) ini adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target sasaran kinerja yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mengetahui

berbagai kekurangan yang harus diperbaiki di waktu mendatang, sekaligus meningkatkan berbagai upaya yang sudah berhasil dicapai.

LKj ini pada hakekatnya merupakan dokumen pertanggungjawaban Kepala OPD kepada Bupati Tanjung Jabung Barat dalam hal pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sub sektor perkebunan dan peternakan selama Tahun 2021 dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja dalam LKj ini.

Dalam LKj ini diuraikan tentang pelaksanaan pembangunan Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan pada Tahun 2021, yang diselenggarakan melalui 7 (tujuh) Program, yang terdiri dari 1 (satu) Program Penunjang dengan 6 (enam) Kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan dan 6 (enam) Program Pokok dengan 7 (tujuh) Kegiatan dan 11 (sebelas) Sub Kegiatan, yang mana keseluruhannya difasilitasi oleh sumber dana APBD II Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupten Tanjung Jabung Barat menyesuaikan dengan metode penulisan yang disajikan pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajian tersebut adalah sebagai berikut :

- Bagian Sampul dan Pengantar berisi sampul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel.
- Bab I Pendahuluan berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab II Perencanaan Kinerja menyajikan ringkasan ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi capaian kinerja organisasi untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta realisasi anggaran yang telah digunakan.

- Bab IV Penutup berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS (2021 - 2026).

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.

Dalam mekanisme pemerintahan, perencanaan pembangunan tersebut dijalankan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan yang terkoordinasi dan terintegrasi, untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dan masyarakat.

Sistem perencanaan pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada hakekatnya terkait erat, dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan tersebut, dimana hasil dari evaluasi Laporan Kinerja (LKj) ini akan menjadi acuan bagi tahapan siklus perencanaan selanjutnya. Oleh karena itu substansi dari LKj ini harus memuat kajian terhadap dokumen perencanaan pembangunannya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 telah dirumuskan pada tahun 2021, yang substansinya merupakan turunan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Adapun ruang lingkup substansi pokok yang tertuang di dalam dokumen Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat Tahun 2021-2026 tersebut, adalah sebagai berikut :

2.1.1. VISI dan MISI Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan pertanian yaitu untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memerhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memerhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian serta melihat potensi wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkepentingan membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Bidang Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan **Visi Pembangunan** Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

Visi :
***Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH 2024
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan
Harmonis)***

Mengandung Makna bahwa : “Mewujudkan pembangunan Perkebunan dan Peternakan dalam suatu penataan wilayah yang berwawasan lingkungan melalui pengintegrasian kegiatan *produksi, pengolahan, distribusi* kegiatan *On Farm* dan *Off Farm* dalam suatu **Sistim Manajemen** dengan menciptakan *Produk-Produk Unggulan* Perkebunan dan Peternakan yang memiliki daya saing dan berkualitas sehingga mampu meningkatkan ketersediaan pangan, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan

5 (lima) *Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026* sebagai berikut:

KODE	MISI
MISI 1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berakhlak
MISI 2	Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib dan demokratis
MISI 3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik
MISI 4	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
MISI 5	Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Dari misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 yang terkait dan menjadi tugas dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah pada **Misi Ketiga**, yaitu **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk Pelayanan Publik**, dan **Misi Keempat**, yaitu **Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan**.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan Visi, Misi tersebut adalah dengan Program dan Kegiatan prioritas pembangunan Bidang Perkebunan dan Peternakan, agar sektor Perkebunan dan Peternakan bisa memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat, sehingga diharapkan sektor Perkebunan dan Peternakan bisa menjadi program/kegiatan unggulan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.1.2. TUJUAN dan SASARAN Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka ditetapkanlah **Tujuan Strategis**.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian **Tujuan Strategis** Pembangunan

Perkebunan dan Peternakan diperlukan beberapa **Sasaran Strategis** yang menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2021. Selanjutnya ditetapkan **Indikator Kinerja Sasaran Strategis** untuk mengukur apakah **Sasaran Strategis** dapat mengkonfirmasi **Tujuan Strategis** yang akan dicapai pada masa mendatang. Hal tersebut tergambar sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-n					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69.60	69.80	69.90	70,10	70.20	70.30
2	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor perkebunan dan peternakan Berbasis Sumber Daya Alam Lokal dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan	1. Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan secara optimal	1. Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton) :						
			- Kelapa Sawit	121.136	123.074	125.166	127.419	129.840	132.437
			- Karet	3.833	3.848	3.867	3.890	3.913	3.936
			- Kelapa dalam	55.050	55.490	55.989	56.549	57.171	57.800
			- Kopi	1.189	1.194	1.200	1.207	1.215	1.224
		- Pinang	10.557	10.663	10.780	10.909	11.039	11.182	
		2. Meningkatkan Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak (Ekor) :						
			- Sapi	9.086	9.267	9.452	9.641	9.833	10.029
			- Kerbau	744	758	773	788	803	819
			- Kambing	48.216	49.180	50.163	51.166	52.189	53.232
- Domba	829		845	861	878	895	912		
- Unggas	1.493.393	1.523.260	1.553.260	1.584.799	1.616.494	1.648.823			

2.1.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan **Strategi** merupakan pernyataan - pernyataan yang menjelaskan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian Kebijakan. **Kebijakan** adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan Strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran. Berikut Strategi dan Kebijakan yang dirumuskan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

Strategi:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
2. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas komoditi Perkebunan secara optimal.
3. Peningkatan Populasi dan Produksi ternak
4. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani pekebun/peternak.
5. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan gangguan reproduksi dengan melaksanakan pengobatan, dan vaksinasi ternak serta mempertahankan dan memperluas status wilayah bebas penyakit hewan menular.
6. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna bagi pengembangan peternakan.
7. Meningkatkan Pengendalian Bencana Pertanian melalui Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Pencegahan Karlabun.
8. Meningkatkan Penyediaan Hijauan Pakan Ternak Berkualitas.
9. Penyediaan Bibit Unggul Komoditi Perkebunan untuk perkebunan berkelanjutan (Bibit Bersubsidi).
10. Meningkatkan sarana dan prasarana perkebunan dan peternakan.
11. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur/Petani

Kebijakan

Kebijakan merupakan arah tindakan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. ***Kebijakan Umum*** Dinas yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi
2. Mewujudkan peningkatan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan secara berkelanjutan.
3. Peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan Pengendalian Bencana dengan melaksanakan proteksi komoditi perkebunan dan penanganan, pengendalian kebakaran lahan kebun serta gangguan usaha perkebunan.
5. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana perkebunan/peternakan melalui bantuan alsintan dan saprodi serta peralatan teknologi untuk meningkatkan mutu hasil perkebunan/peternakan.
6. Peningkatan kelembagaan dan pemberdayaan petani pekebun/peternak melalui pendampingan, penyuluhan, pelatihan dan peran serta masyarakat.
7. Mewujudkan peningkatan populasi dan produksi ternak dengan Sinkronisasi Birahi dan Inseminasi Buatan, Integrasi Ternak dengan Tanaman Perkebunan, pemanfaatan bahan pakan lokal dan pemberdayaan peternak.
8. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan melalui peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana keswan, obat-obatan, medis dan paramedis.
9. Peningkatan sumber – sumber pakan ternak dan hijauan pakan ternak yang berkualitas.

10. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna bagi pengembangan peternakan melalui UPPO, Rumah Kompos, Biogas (Chopper) serta meningkatkan sarana operasional petugas lapangan.

**Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Strategi dan Kebijakan
Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026**

VISI : "MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH" (BERKUALITAS,EKONOMI MAJU,RELIGIUS,KOMPETITIF,AMAN DAN HARMONIS)			
MISI 3 : " Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik " .			
Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi
MISI 4 : " Peningkatan Aktivitas Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan " .			
Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi sub sector perkebunan dan peternakan berbasis sumber daya alam lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan	1. Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan secara optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi dan Produktifitas Komoditi Perkebunan secara optimal 2. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani pekebun 3. Meningkatkan Pengendalian Bencana pertanian melalui Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Pencegahan Karlabun 4. Penyediaan Bibit Unggul Komoditi Perkebunan untuk perkebunan Berkelanjutan (bibit bersubsidi) 5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perkebunan 6. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur/Petani 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan peningkatan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan secara berkelanjutan 2. Meningkatkan penyediaan teknologi dan penerapan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan 3. Mewujudkan Pengendalian Bencana dengan melaksanakan proteksi komoditi perkebunan dan penanganan, pengendalian kebakaran lahan kebun serta gangguan usaha perkebunan 4. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana perkebunan/peternakan melalui bantuan – bantuan alsintan dan saprodi serta peralatan teknologi untuk meningkatkan mutu hasil produksi 5. Peningkatan kelembagaan dan pemberdayaan petani pekebun/peternak melalui pendampingan, penyuluhan, pelatihan dan peran serta masyarakat.

	<p>2. Meningkatnya Populasi Ternak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan populasi dan produksi 2. Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Petani Peternak 3. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan gangguan reproduksi dengan melaksanakan pengobatan dan vaksinasi ternak serta mempertahankan dan memperluas status wilayah bebas penyakit hewan menular. 4. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna bagi pengembangan peternakan 5. Peningkatan Penyediaan Hijauan Pakan Ternak yang berkualitas 6. Meningkatkan sarana dan prasarana peternakan. 7. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan peningkatan populasi dan produksi ternak dengan Sinkronisasi Birahi dan Inseminasi Buatan, Integrasi Ternak dengan Tanaman Perkebunan, pemanfaatan bahan pakan lokal dan pemberdayaan peternak 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan melalui sarana prasarana keswan, obat-obatan dan medis/paramedis 3. Peningkatan sumber - sumber pakan ternak dan hijauan pakan ternak yang berkualitas 4. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna bagi pengembangan peternakan melalui UPPO, Rumah Kompos, Biogas (Chopper) serta meningkatkan sarana operasional petugas lapangan 5. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana peternakan melalui bantuan alsintan dan peralatan teknologi peternakan
--	--	--	---

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam merealisasikan semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat kita lihat dengan Indikator Kinerja. Dengan Indikator Kinerja dapat kita ketahui sejauh mana anggaran yang telah direalisasikan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan telah mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka memperkuat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah serta penerapan tata pemerintahan yang baik, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah menerbitkan Peraturan Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan apakah telah berhasil dicapai atau tidak. Sedangkan Keluaran disini yang kita sebut Output adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, tujuan program dan kebijakan.

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, dari kinerja ini dapat diketahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Strategi OPD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu kepada Renstra 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target (2021)
1.	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang efektif, efisien dan akintabel	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Adopsi dari nilai SAKIP Perangkat Daerah sekarang (69.60
2.	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan Berbasis Sumber Daya Alam Lokal dengan menjaga kelestarian lingkungan	<p>1. Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan Secara Optimal</p> <p>2. Meningkatkan Populasi Ternak</p>	<p>1. Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelapa Sawit - Karet - Kelapa Dalam - Kopi - Pinang <p>2. Jumlah Populasi Ternak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sapi - Kerbau - Kambing - Domba - Unggas 	<p>Jumlah Produksi pada tahun t)</p> <p>Mengukur populasi ternak pada tahun sekarang (t) = jumlah populasi ternak tahun lalu + kelahiran + pemasukan - kematian - pengeluaran - pemotongan</p>	<p>121.136</p> <p>3.833</p> <p>55.050</p> <p>1.189</p> <p>10.557</p> <p>9.086</p> <p>744</p> <p>48.216</p> <p>829</p> <p>1.493.393</p>

2.3. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Di dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, telah dijabarkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yaitu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, yang memuat target-target capaian indikator Sasaran Strategis, Sasaran Program, maupun Sasaran Kegiatan, dengan mempertimbangkan Isu Strategis, Arah Kebijakan Pembangunan, Tugas Pokok dan Fungsi OPD, serta kemampuan sumber daya yang dimiliki. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahun 2021 sendiri dengan anggaran sebesar Rp. 10.478.040.001.- yang diselenggarakan melalui 7 (tujuh) Program, yang terdiri dari 1 (satu) Program Penunjang dengan 6 (enam) Kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan dan 6 (enam) Program Pokok dengan 7 (tujuh) Kegiatan dan 11 (sebelas) Sub Kegiatan, yang mana keseluruhannya difasilitasi oleh sumber dana APBD II Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran I), bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran I), adalah sebagai berikut :

1.	Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
2.	Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3.	Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan Sanksi
4.	Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
5.	Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Dengan mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, serta dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjab Barat Tahun 2021.

2.4.1. PERJANJIAN KINERJA UTAMA

Perjanjian Kinerja Utama adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala OPD dengan Kepala Daerah (Bupati), dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator sasaran strategis dan tercantum dalam **Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2021-2026**. Perjanjian Kinerja Utama ini sebagai dasar pengukuran pencapaian sasaran strategis OPD.

Untuk Tahun 2021 Perjanjian Kinerja Utama yang dimaksud memuat 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator sasaran strategis berdasarkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut ini:

**Target Penetapan Kinerja
Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tangjung Jabung Barat Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR STRATEGIS	TARGET 2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69.60
2	<p>1. Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan (ton)</p> <p>2. Meningkatkan Populasi Ternak (ekor)</p>	<p>Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelapa Sawit - Karet - Kelapa Dalam - Kopi - Pinang <p>Jumlah Populasi Ternak (Ekor) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sapi - Kerbau - Kambing - Domba - Unggas 	<p>121.136</p> <p>3.833</p> <p>55.050</p> <p>1.189</p> <p>10.557</p> <p>9.086</p> <p>744</p> <p>48.216</p> <p>829</p> <p>1.493.393</p>

2.4.2. PERJANJIAN KINERJA PROGRAM (Outcome) dan KEGIATAN (Output)

Perjanjian Kinerja Program adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala OPD dengan Kepala Unit Kerja Eselon-III, dengan target Indikator kinerja yang diperjanjikan adalah Indikator Kinerja Program (Outcome).

Sedangkan Perjanjian Kinerja Kegiatan yang disepakati antara Kepala Bidang Eselon III dan Kepala Seksi/Kasubbag Eselon IV merupakan Indikator Kinerja (Output). Perjanjian Kinerja Program ini sebagai dasar pengukuran kinerja Program yang akan memperkuat hasil analisis dalam pengukuran pencapaian indikator sasaran *Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2021*. Adapun untuk tahun 2021 ini Perjanjian Kinerja Program dan Kegiatan yang dimaksud adalah sebagaimana terlampir.

Perjanjian Kinerja Program (Outcome) Tahun 2021
Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2021	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	100 %	Bidang Sekretariat
2.	1. Meningkatnya Produksi komoditi perkebunan (ton)	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	1. Persentase peningkatan produktivitas komoditi perkebunan 2. Angka Penanggulangan OPT dan gangguan usaha perkebunan 3. Indeks Peningkatan Ketersediaan Prasarana Perkebunan/Peternakan sesuai peruntukannya 4. Jumlah STDB untuk petani perkebunan yang diterbitkan 5. Persentase Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani dan Informasi Sektor Perkebunan	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 1,3%, karet = 0,1 %, kelapa dalam = 0,7%,kopi = 0,1% pinang = 0,8% 2. 100 % 3. 21 % 4. 350 STDB 5. 20 %	Bidang Perkebunan Bidang Perkebunan Bidang Perkebunan, Bidang Saprass dan Bidang Peternakan Bidang Saprass Bidang Penyuluhan
	2. Meningkatnya populasi ternak (ekor)	Jumlah Populasi Ternak (ekor)	6. Angka kebuntingan sapi yang di IB 7. Angka Kematian Ternak	6. Angka Kebuntingan Sapi = 70 % 7. 1.7 %	Bidang Peternakan Bidang Peternakan

Perjanjian Kinerja Kegiatan (Output) Tahun 2021
Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target 2021	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Renstra, Renja, DPA, Evaluasi Renstra, Evaluasi Renja dan Lakip 2. Laporan Keuangan Tahunan OPD 3. Tingkat Kehadiran Pegawai/ASN 4. Cakupan Layanan Administrasi Umum 5. Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah 6. Terlaksananya pemeliharaan BMD penunjang urusan pemda 	<p>12 dokumen</p> <p>1 laporan</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	Bidang Sekretariat
2.	1. Meningkatkan Produksi komoditi perkebunan (ton	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase peningkatan produktivitas komoditi perkebunan 2. Indeks Peningkatan Ketersediaan Prasarana Perkebunan/Peternakan sesuai peruntukannya 3. Angka Penanggulangan OPT dan gangguan usaha perkebunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertambahnya luas Blok Penghasil Tinggi Kelapa Dalam, Kopi dan Pinang dan Terkelolanya kebun percontohan kopi dan kelapa sawit serta tersedianya bibit unggul komoditi perkebunan 2. Bertambahnya kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana Perkebunan 3. Terkendalinya OPT Perkebunan dan Kebakaran Lahan/Kebun Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3.717 PIK, 3.571 PIP, 775 PIK (kopi), 10 Ha 2. 7 KT 3. 95 % 	<p>Bidang Perkebunan</p> <p>Bidang Sapras</p> <p>Bidang Perkebunan</p>

			<p>4. Jumlah STDB untuk petani perkebunan yang diterbitkan</p> <p>5. Persentase Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani dan Informasi Sektor Perkebunan/Peternakan</p>	<p>4. Meningkatnya petani pekebun yang mendapatkan STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya)</p> <p>5. Meningkatnya materi kelembagaan kelembagaan kelompok tani dan informasi sektor perkebunan dan Tersusunnya Data Komoditi Perkebunan</p>	<p>4. 100 %</p> <p>5. 12 kelompok, 1 dokumen</p>	<p>Bidang Saprass</p> <p>Bidang Penyuluhan</p>
	2. Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak (ekor)	<p>1. Angka kebuntingan sapi yang di IB</p> <p>2. Angka Kematian Ternak</p>	<p>1. Jumlah Ternak yang di IB dan Sinkronisasi</p> <p>2. Tersedianya Sapi Bakalan di Kandang, Ternak Sapi, Kambing dan Unggas yang dihibahkan 2. Tersedianya Bibit Hijauan Pakan Ternak</p> <p>3. Terlaksananya pemeliharaan dan pencegahan penyakit menular ternak</p>	<p>1. 1.500 ekor</p> <p>2. 3 ekor sapi bakalan, 40 ekor sapi pengembangan /hibah</p> <p>3. Vaksinasi =3000 ekor, Pemeriksaan PKB=1000 ekor, Pengobatan =2000 ekor</p>	<p>Bidang Peternakan</p> <p>Bidang Peternakan</p> <p>Bidang Peternakan</p>

2.4.3. PAGU ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2021

Adapun Pagu Anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 sesuai Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir pada tabel dibawah ini.

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.506.867.036.-
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	271.147.296.-
1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	41.604.311.-
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	79.674.643.-
1.3	Evaluasi kinerja perangkat daerah	149.868.342.-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.993.105.177.-
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.806.545.177.-
2.2	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	36.500.000.-
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.319.200.-
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	38.319.200.-
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	692.439.241.-
4.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.667.331.-
4.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	66.097.510.-
4.3	Penyediaan bahan logistik kantor	19.320.000.-
4.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.780.400.-
4.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.200.000.-
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	566.374.000.-
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	212.018.00.-
5.1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.798.000.-
5.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	83.820.000.-
5.3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	123.400.000.-
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	299.838.122.-
6.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	106.350.000.-
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.150.000.-
6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.538.200.-

6.4	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	18.799.922.-
II.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.393.865.996.-
1.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	681.239.250.-
1.1	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG (Sumber Daya Genetik) hewan/tanaman	139.602.500.-
1.2	Pemanfaatan SDG (Sumber Daya Genetik) hewan/tanaman	248.180.450.-
1.3	Peningkatan Kualitas SDG (Sumber Daya Genetik) hewan/tanaman	293.456.300.-
2.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	712.626.746.-
2.1	Pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	712.626.746.-
III.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	354.230.000.-
1.	Pembangunan Prasarana Pertanian	354.230.000.-
1.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	354.230.000.-
IV.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	612.809.285.-
1.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	612.809.285.-
1.1	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	612.809.285.-
V.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	287.758.622.-
1.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	287.758.622.-
1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan	77.878.622.-
1.2	Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan	133.825.000.-
1.3	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	76.055.000.-
VI.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	154.649.529.-
1.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	154.649.529.-
1.1	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	154.649.529.-
VII.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	167.859.533.-
1.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	167.859.533.-
1.1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	167.859.533.-
	JUMLAH	10.478.040.001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan digunakan pengukuran kinerja sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut peraturan tersebut, bahwa salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja, yang dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran, yaitu dengan memanfaatkan data kinerja, baik berupa data internal (dari dalam instansi) maupun data eksternal (dari luar instansi). Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran

keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

Indikator Kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing OPD. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II dan III) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat dibawah Eselon III.

3.1.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimaksudkan dalam laporan kinerja ini, adalah untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026, guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis tersebut. Dalam kerangka pengukuran kinerja ini terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Adapun mengenai rumus yang digunakan untuk pengukuran kinerja ini adalah sebagai berikut

Rumus 1:

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana} = \frac{\text{Realisasi Tahun } t}{\text{Target Rencana Tahun } t} \times 100$$

Rumus 2:

$$\text{Persentase Peningkatan/} \\ \text{Penurunan capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Thn } t - \text{Realisasi Thn } t-1}{\text{Realisasi Tahun } t-1} \times 100$$

Rumus 3:

$$\text{Persentase Perbandingan dengan} \\ \text{Tahun Sebelumnya} = \frac{\text{Realisasi Thn } t}{\text{Realisasi Tahun } t-1} \times 100$$

Rumus 4:

$$\text{Persentase Perbandingan dengan} \\ \text{Target Jangka Menengah} = \frac{\text{Realisasi Thn Awal Renstra sd Thn } t}{\text{Target Akhir Renstra Tahun } n} \times 100$$

Rumus 5:

$$\text{Persentase Perbandingan dengan} \\ \text{Nasional} = \frac{\text{Realisasi Thn } t}{\text{Realisasi Nasional Thn } t} \times 100$$

Untuk memberikan makna terhadap nilai persentase pencapaian kinerja tersebut, maka ditentukan melalui sebutan sebagai berikut :

- 1 Nilai diatas 100% dengan sebutan Sangat Baik (SB)
- 2 Nilai diatas 80% s/d 100% dengan sebutan Baik (B)
- 3 Nilai diatas 55% sk/d 80% dengan sebutan Cukup (C)
- 4 Nilai dibawah 55% dengan sebutan Kurang (K)

3.1.2. PERBANDINGAN TARGET dan REALISASI INDIKATOR KINERJA.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021.

Target Kinerja Tahun 2021 yang sudah dituangkan dalam Dokumen Penetapan Indikator Kinerja (IKU) telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam pencapaian IKU Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tersebut maka realisasi capaian kinerja bisa diukur dengan cara membandingkan antara realisasi

terhadap target sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

**REALISASI CAPAIAN KINERJA UTAMA TERHADAP PENETAPAN KINERJA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR STRATEGIS	Target 2021	Realisasi* 2021	Capaian Thd PK (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69.60	64.23	92,28 %
2	1. Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan (ton)	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton) : - Kelapa Sawit - Karet - Kelapa dalam - Kopi - Pinang	121.136 3.833 55.050 1.189 10.557	125.942 3.541 55.817 1.160 8.601	103,97 92,38 101,39 97,56 81,47
Rata-rata Realisasi Sasaran 1					95,36
	2. Meningkatkan Populasi Ternak (ekor)	Jumlah Populasi Ternak (Ekor) : - Sapi - Kerbau - Kambing - Domba - Unggas	9.086 744 48.216 829 1.493.393	9.038 731 46.784 819 1.486.261	99,47 98,25 97,03 98,79 99,52
Rata-rata Realisasi Sasaran 2					98,61

Berdasarkan Realisasi Capaian Kinerja Utama terhadap Penetapan Kinerja dari tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 yaitu meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dilihat dari realisasi sasaran yaitu diatas 90% (92.28%). Pencapaian kinerja ini dinilai BAIK. Namun untuk kedepannya perlu dilakukan upaya untuk menjadi lebih baik lagi.

2. Sasaran 2 yaitu :

- Meningkatnya produksi komoditi perkebunan diatas 90% (95,36%). Pencapaian kinerja ini dinilai BAIK. Namun untuk kedepannya perlu dilakukan upaya untuk lebih baik lagi.
- Meningkatnya populasi ternak diatas 90% (98,61%). Pencapaian kinerja ini dinilai BAIK. Namun kedepannya perlu dilakukan upaya yang lebih baik lagi.

Dilihat dari visi dan misi Bupati terpilih periode 2021-2026, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat masuk kedalam misi ke tiga yaitu ***“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk Pelayanan Publik”*** dan misi ke empat yaitu ***“Peningkatan Aktivitas Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan”***. Untuk mendukung misi tersebut ada beberapa program kegiatan yang menyentuh langsung ke masyarakat melalui dana APBD II dan untuk Tahun Anggaran 2021 kegiatan yang langsung menyentuh ke masyarakat antara lain :

1. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman

Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman ini merupakan kegiatan untuk menjaga kelestarian SDG Tanaman Komoditi Perkebunan yang merupakan spesifik local seperti Kelapa Dalam Gambut, Kopi Libtukom dan Pinang Betara. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan jumlah Blok Penghasil Tinggi (BPT) tetap bertahan dengan diberikannya bantuan pupuk bagi petani yang kebunnya ditetapkan sebagai BPT. Selanjutnya untuk kedepannya bagi tanaman yang terpilih sebagai Pohon Induk Terpilih (PIT) agar tetap berproduksi dengan baik sesuai dengan umur tanaman yang ada. Adapun jumlah Pohon Induk Terpilih untuk tanaman kelapa dalam sejumlah 3.717 PIK, tanaman pinang sejumlah 3.571 PIP dan 775 PIK untuk tanaman kopi.

2. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman melalui kegiatan Inseminasi Buatan (IB) ini merupakan salah satu upaya penerapan

teknologi tepat guna yang merupakan pilihan utama untuk peningkatan populasi dan mutu genetik ternak. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kebuntingan dan kelahiran ternak hasil Inseminasi Buatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk pelayanan kegiatan ini terdapat di 13 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Melalui 13 (tiga belas) orang Inseminator yang ada diharapkan ternak sapi yang ada berkembang dengan peningkatan populasi ternak.

3. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

Kegiatan ini merupakan kegiatan Pemeliharaan Kebun Percontohan Kopi Libtukom dan Pemeliharaan Kebun Percontohan Kelapa Sawit yang sudah ada. Dengan adanya kegiatan ini kita tetap memelihara kebun percontohan yang ada melalui pemberian pupuk dan perlakuan sesuai dengan anjuran teknis. Selain itu nantinya hasil dari kegiatan ini adalah untuk menambah Pendapatan Daerah yang merupakan PAD dari Sektor Perkebunan.

4. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang langsung bersentuhan kepada masyarakat peternak. Tahun 2021 ini selain pengadaan sapi bakalan sebanyak 3 (tiga) ekor juga ada bantuan ternak hibah kepada masyarakat berupa ternak sapi sebanyak 40 ekor. Sapi Bakalan sebanyak 3 (tiga) ekor dipelihara di Kandang Eks. UPTD Puskesmas dan IB Desa Pembengis Kec. Bram Itam, sedangkan ternak sapi hibah sebanyak 40 ekor merupakan ternak sapi hibah yang akan diberikan kepada kelompok tani.

Dengan adanya pengadaan ternak sapi ini kepada masyarakat diharapkan jumlah ternak sapi indukan atau akseptor menjadi meningkat sehingga dampaknya juga terhadap peningkatan populasi. Adapun kelompok tani penerima bantuan ternak sapi tahun 2021 dengan sumber dana APBD II yaitu :

1. Kelompok Tani Bumi Suci Desa Bram Itam Raya Kecamatan Bram Itam sebanyak 8 (delapan) ekor, Jantan 1 ekor dan Betina 7 ekor.

2. Kelompok Tani Duren Desa Badang Sepakat Kecamatan Tungkal Ulu sebanyak 8 (delapan) ekor, Jantan 1 ekor dan Betina 7 ekor.
3. Kelompok Tani Harapan Budi Desa Kempas Jaya Kecamatan Senyerang sebanyak 8 (delapan) ekor, Jantan 1 ekor dan Betina 7 ekor.
4. Kelompok Tani Sinar Baru I Desa Sungai Kepayang Kecamatan Senyerang sebanyak 8 (delapan) ekor, Jantan 1 ekor dan Betina 7 ekor.
5. Kelompok Tani Sumber Cahaya Desa Kempas Jaya Kecamatan Senyerang sebanyak 8 (delapan) ekor, Jantan 1 ekor dan Betina 7 ekor.

Selain itu untuk pengadaan ternak sapi (ruminansia besar) juga didapat dari sumber dana APBD I. Adapun jumlah ternak sapi yang diterima oleh kelompok tani sebanyak 176 ekor. Adapun kelompok tani atau desa/kecamatan yang mendapat bantuan tersebut antara lain yaitu :

1. Kelompok Tani Marsada Jaya Desa Pematang Tembesu Kec. Tungkal Ulu sebanyak 10 ekor sapi (sapi betina).
2. Kelompok Tani Immel Sejahtera Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi sebanyak 10 ekor sapi (sapi betina)
3. Kelompok Tani Setia Kawan Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi sebanyak 10 ekor sapi (sapi betina)
4. Kelompok Tani Mekar Jaya Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi sebanyak 10 ekor sapi (sapi betina)
5. Kelompok Tani Subur Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi sebanyak 20 ekor sapi (sapi betina).
6. Kelompok Tani Maju Lancar Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi sebanyak 10 ekor sapi (sapi betina).
7. Kelompok Tani Tani Maju Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi sebanyak 10 ekor sapi (sapi betina).
8. Kelompok Tani Suka Maju Desa Tanjung Senjulung Kec. Bram Itam sebanyak 10 ekor sapi (sapi betina).
9. Kelompok Tani Margo Kencana Desa Sungai Paur Kec. Renah Mendaluh sebanyak 10 ekor sapi (sapi betina).

10. Kelompok Tani Budi Rahayu Desa Bukit Bakar Kec. Renah Mendaluh sebanyak 10 ekor sapi (sapi betina).
11. Kelompok Tani Mawar Desa Delima Kec. Tebing Tinggi sebanyak 15 ekor sapi (sapi betina).
12. Kelompok Tani Sumber Jaya Desa Sungai Keruh Kec. Tebing Tinggi sebanyak 15 ekor sapi (sapi betina).
13. Kelompok Tani Enggal Jaya Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi sebanyak 6 ekor sapi (sapi betina).
14. Kelompok Tani Kenanga Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi sebanyak 6 ekor sapi (sapi betina).
15. Kelompok Tani Sansibar Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi sebanyak 6 ekor sapi (sapi betina).
16. Kelompok Tani Sri Mukti Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi sebanyak 6 ekor sapi (sapi betina).
17. Kelompok Tani Teladan Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi sebanyak 6 ekor sapi (sapi betina).
18. Kelompok Tani Suko Jadi Desa Cinta Damai Kec. Tebing Tinggi sebanyak 6 ekor sapi (sapi betina).

5. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar kelompok tani perkebunan yang ada bisa memanfaatkan bantuan hibah tersebut agar hasil perkebunan jauh lebih baik lagi dan dapat meningkatkan produksi serta pendapatan masyarakat /petani pekebun.

Adapun bantuan hibah yang diberikan kepada kelompok tani yaitu bantuan seng untuk lantai jemur pinang dengan kelompok tani penerima sebagai berikut :

1. Kelompok Tani Berkat Ilahi Desa Pantai Gading Kecamatan Bram Itam, dengan jumlah bantuan yang diterima sebanyak 16 kodi.
2. Kelompok Tani Cahaya Baru Desa Betara Kanan Kecamatan Kuala Betara dengan jumlah bantuan yang diterima sebanyak 20 kodi.

3. Kelompok Tani Harapan Jaya Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir dengan jumlah bantuan yang diterima sebanyak 24 kodi.
4. Kelompok Tani Karya Budi Desa Tungkal IV Desa Kecamatan Seberang Kota dengan jumlah bantuan yang diterima sebanyak 25 kodi.
5. Kelompok Tani Lampung Jaya I Desa Pantai Gading Kecamatan Bram Itam dengan jumlah bantuan yang diterima sebanyak 25 kodi.
6. Kelompok Tani Sumber Rezeki Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir dengan jumlah bantuan yang diterima sebanyak 30 kodi.
7. Kelompok Tani Tanjung Permai Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara dengan jumlah bantuan yang diterima sebanyak 25 kodi.

6. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis ini dilaksanakan dengan maksud agar ternak yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini bisa terlayani untuk pengobatan, pemeriksaan kebuntingan, pemeriksaan spesimen, vaksinasi dan eliminasi. Kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai dengan target DPA Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Pengobatan	2.000 ekor	2.000 ekor	100 %
2.	PKB	1.000 ekor	1.000 ekor	100 %
3.	Pemeriksaan Spesimen	1.000 ekor	1.000 ekor	100 %
4.	Vaksinasi	2.500 ekor	2.500 ekor	100 %
5.	Eliminasi	100 ekor	100 ekor	100 %

7. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan

Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan ini dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan produksi komoditi perkebunan. Melalui kegiatan ini dimaksudkan agar tanaman perkebunan tetap terjaga dari serangan hama dan penyakit tanaman. Pengendalian OPT dilaksanakan secara kimia dan hayati. Secara kimia

dilaksanakan melalui pemberian obat – obatan berupa insektisida dan herbisida yang sesuai dengan tanaman yang terserang.

Sedangkan untuk pengendalian OPT secara hayati dilaksanakan oleh UPT Perlindungan Tanaman Perkebunan yang merupakan perpanjangan tangan dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan Pengendalian OPT secara hayati dilaksanakan sesuai dengan tupoksi pada UPT Perlindungan Tanaman Perkebunan. Pengendalian OPT yang dilakukan pada tahun 2021 ini antara lain yaitu :

1. Desa Sungai Dualap Kec. Kuala Betara, dilakukan pemasangan trapping (sarang perangkap) seluas 30 Ha pada tanaman kelapa dalam
2. Desa Pembengis Kec. Bram Itam dilakukan pengendalian hama kumbang pada tanaman kelapa seluas 12 Ha.
3. Desa Mandala Jaya Kec. Betara dilakukan pengendalian Penyakit Jamur Akar Putih (JAP) pada tanaman kopi dan pinang seluas 18 Ha.
4. Desa Tungkal I Kec. Tungkal Ilir dilakukan pengendalian hama kumbang kelapa pada tanaman kelapa dalam seluas 5 Ha.
5. Desa Sungai Dualap Kec. Kuala Betara dilakukan pengendalian hama kumbang kelapa pada tanaman kelapa dalam seluas 30 Ha.
6. Desa Sungai Gebar Barat Kec. Kuala Betara dilakukan pengendalian penyakit Jamur Akar Putih (JAP) pada tanaman kelapa sawit seluas 19 Ha.

8. Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar bencana kebakaran lahan dan kebun serta gangguan usaha perkebunan tidak terjadi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Apabila terjadi kebakaran lahan, tim dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat akan turun bersama-sama Badan Penanggulangan Bencana, Kodim dan Polres.

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki Tim Pencegahan dan Penanganan Kebakaran lahan dan kebun yang berjumlah 15 orang. Adapun tugas dari Tim ini adalah melaksanakan

pemadaman api jika terjadi bencana kebakaran lahan dan kebun. Sedangkan apabila tidak terjadi kebakaran maka Tim Dalkarlabun akan tetap siaga dan melaksanakan patroli. Adapun lokasi pelaksanaan pengendalian dan patroli yang dilakukan pada Tahun 2021 yaitu :

1. Kecamatan Pengabuan
2. Kecamatan Betara
3. Kecamatan Senyerang
4. Kecamatan Kuala Betara
5. Kecamatan Bram Itam

Selain itu, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat juga mempunyai Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang berada di 3 (tiga) kecamatan yang juga membantu dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran lahan dan kebun. Adapun KTPA dimaksud adalah sebagai berikut yaitu :

- 1) KTPA Karya Lestari Desa Muntialo Kecamatan Betara
- 2) KTPA Mekar Sari Desa Dataran Pinang Kecamatan Kuala Betara
- 3) KTPA Harapan Jaya Desa Sungai Baung Kecamatan Pengabuan

9. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar petani – petani yang ada diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya petani kelapa sawit untuk melegalkan usaha taninya. Dengan terdatanya petani pekebun kelapa sawit diharapkan kedepannya data kepemilikan kebun rakyat ini menjadi informasi pendukung dalam mengambil kebijakan. Target STDB Tahun 2021 sebanyak 350 STDB terealisasi 100 % dengan target petani kelapa sawit di Kecamatan Betara, Bram Itam, Pengabuan, Senyerang dan Kuala Betara. Selain itu kegiatan ini juga membantu kelembagaan petani supaya lebih baik lagi sehingga memudahkan pemerintah daerah dan pusat dalam menentukan atau membantu petani melalui program pemerintah seperti program Replanting dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

10. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Dalam kegiatan inilah pelatihan terhadap petani dilakukan, pelatihan yang diberikan berupa pelatihan teknis dan pengembangan SDM. Adapun pelatihan yang diberikan berupa pelatihan untuk menumbuhkan kelembagaan, meningkatkan keterampilan dan kemampuan ekonomi serta merubah sikap dan perilaku petani. Ada beberapa kelompok tani yang mendapatkan pelatihan antara lain :

1. Kelompok Tani Tanjung Permai Desa Bungo Tanjung Kecamatan Betara
2. Kelompok Tani Bumi Suci Desa Bram Itam Raya Kecamatan Bram Itam
3. Kelompok Tani Setia Kawan Desa Sungai Gebar Kecamatan Kuala Betara
4. Kelompok Tani Harapan Baru Desa Kuala Indah Kecamatan Kuala Betara
5. Kelompok Tani Cahaya Baru Desa Betara Kanan Kec. Kuala Betara

b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Utama (IKU) dengan Target RENSTRA 2021-2026.

Dalam Dokumen Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 telah ditentukan target kinerja tahunannya, yaitu dari tahun 2021 hingga tahun 2026. Adapun sebagai tolok ukur perkembangan capaian target kinerja Renstra tersebut maka dilakukan pengukuran capaian kinerja pada Tahun 2021 terhadap total target Renstra di Tahun 2022 :

**REALISASI CAPAIAN KINERJA UTAMA TERHADAP TARGET RENSTRA 2022
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR STRATEGIS	Target Renstra 2022	Realisasi 2021(*)	Capaian Thd Target Renstra 2022 (%)
1	2	3	4	5	6
I.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69.80	64.23	92,02

	Kinerja Perangkat Daerah				
2.	1. Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton) : - Kelapa Sawit - Karet - Kelapa Dalam - Kopi - Pinang	123.074 3.848 55.490 1.194 10.663	125.942 3.541 55.817 1.160 8.601	102.33 92.02 100.59 97.15 80.66
Rata-rata Realisasi					94,55
	2. Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak (Ekor) : - Sapi - Kerbau - Kambing - Domba - Unggas	9.267 758 49.180 845 1.523.260	9.038 731 46.784 819 1.486.261	97.53 96.44 95.13 96.92 97.57
Rata-rata Realisasi					96.72

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja IKU terhadap Target Renstra 2022 yang disajikan pada tabel tersebut di atas, secara keseluruhan diperoleh hasil masing - masing dari ke-2 sasaran kinerja tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Sasaran 1** yaitu Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yang mana pada tahun 2021 capaian terhadap target renstra tahun 2022 sebesar 92,02%. Kondisi tersebut ditafsirkan bahwa ada selisih 7,98% yang harus diupayakan OPD dalam mendorong peningkatan kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
2. **Sasaran 2** yaitu :
 - **Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)**, yang mana indikator perbandingan Produksi Komoditi Perkebunan pada Tahun 2021 terhadap target renstra Tahun 2022 rata-rata sebesar **94,55%**. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa terdapat selisih sebesar 5,45% yang harus diupayakan OPD dalam mendorong peningkatan produksi komoditi perkebunan agar pada target periode RPJMD secara **kualitatif** dan **kuantitatif** memenuhi target

yang telah ditetapkan. Namun dari skala penilaian masih dalam target (**BAIK**) *Skala 80%-100%*.

- **Meningkatnya Populasi Ternak (Ekor)**, indikator perbandingan Populasi Ternak pada tahun 2021 rata-rata terhadap target kinerja tahun 2022 sebesar 96,72%. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan bahwa terdapat selisih sebesar 3,28% yang harus diupayakan OPD dalam mendorong peningkatan populasi ternak agar pada target periode RPJMD secara kualitatif dan kuantitatif bisa memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun dari skala penilaian masih dalam target (BAIK).

c. PERBANDINGAN ANTARA TARGET dan REALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN 2021.

Adapun realisasi dari kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

**REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. TANJAB BARAT TAHUN 2021**

Urusan Pilihan

Kode		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	(% Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Penanggung Jawab
Prog	Keg						
3.27.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik	100%	100%	100%	Sekretaris
3.27.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja,DPA,Evaluasi Renstra,Evaluasi Renja dan Lakip	12 dokumen	12 dokumen	100%	
3.27.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ranwal renstra,rancangan renstra,rancangan akhir renstra,Renstra,ranwal renja,rancangan renja, rancangan akhir renja dan renja	8 dokumen	8 dokumen	100%	
3.27.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah dokumen LAKIP/LKiJ, LPPK, LPPD dan Data Statistik Perkebunan dan Peternakan	2 dokumen	2 dokumen	100%	
3.27.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Kinerja Renstra, Evaluasi Renja Triwulan I, Evaluasi Renja Triwulan II, Evalluasi Renja III, Evaluasi Renja Triwulan IV	3 dokumen	3 dokumen	100%	
3.27.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Tahunan OPD	1 laporan	1 laporan	100%	
3.27.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	12 bulan	12 bulan	100%	
3.27.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan honorarium	12 bulan	12 bulan	100%	
3.27.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kehadiran Pegawai/ASN	100 %	100 %	100%	

3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	78 stel	78 stel	100%	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	12 bulan	12 bulan	100%	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Penerangan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	100%	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak (blangko atau formulir, florist, spanduk) dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	100%	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	12 bulan	100%	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	12 bulan	12 bulan	100%	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkelola	12 bulan	12 bulan	100%	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Beban Pemakaian Air dan Beban Pemakaian Listrik	12 bulan	12 bulan	100%	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	100%	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD penunjang urusan pemda	100 %	96 %	96%	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	26 unit	25 unit	96%	

3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	20 unit	19 unit	95%	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	32 unit	32 unit	100%	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dinas dan UPT yang terpelihara	1 unit dinas	1 unit dinas	100%	
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditi Perkebunan (%) 2. Angka Kebuntingan Sapi yang di Inseminasi Buatan (IB)	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 1,5%, karet = 0,3 %, kelapa dalam = 0,7%,kopi = 0,3% pinang = 0,9% 2. Angka Kebuntingan Sapi = 70 %	100%Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 1,5%, karet = 0,1 %, kelapa dalam = 0,6%,kopi = 0,2% pinang = 0,8% 2. Angka Kebuntingan Sapi = 75 %	92,28 %	Kabid Perkebunan dan Kabid Peternakan
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Bertambahnya luas Blok Penghasil Tinggi Kelapa Dalam, Kopi dan Pinang 2. Tekelolanya kebun percontohan Kopi dan Kelapa Sawit serta tersedianya bibit unggul komoditi perkebunan 3. Jumlah Ternak yang di IB dan Sinkron	95 %	92 %	97 %	
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pohon di Blok Penghasil Tinggi (BPT) Kelapa Dalam, Kopi Libtukom,Pinang	3.717 PIK, 3.571 PIP, 775 PIK	3.717 PIK, 3.571 PIP, 775 PIK	100%	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Sapi yang di IB dan Sinkronisasi Birahi	1.300 ekor	1.189 ekor	91%	

3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Terlaksananya Pemeliharaan Kebun Percontohan Kopi Libtukom dan Kelapa Sawit serta tersedianya bibit unggul komoditi perkebunan	10 Ha	10 Ha	100%	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain	1. Tersedianya Sapi Bakalan di Kandang, Ternak Sapi, Kambing dan Unggas yang dihibahkan 2. Tersedianya Bibit Hijauan Pakan Ternak	43 ekor	43 ekor	100%	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Ternak Sapi yang dipelihara, Ternak Sapi Pengembangan, Kambing dan Unggas yang disebarakan	3 ekor sapi bakalan, 40 ekor sapi pengembangan	3 ekor sapi bakalan, 40 ekor sapi pengembangan	100%	
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Indeks Peningkatan Ketersediaan Prasarana Perkebunan/Peternakan sesuai peruntukannya	21 %	21 %	100%	Kabid Sapras
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	1. Bertambahnya Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan/Peternakan 2. Terkelolanya kebun percontohan kelapa sawit	1. 7 KT 2. 0 Ha	1. 7 KT 2. 0 Ha	100%	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1. Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan Alsintan dan Saprodi Perkebunan/Peternakan serta Rumah Kompos 2. Luas Kebun Percontohan Kelapa Sawit yang dibangun	1. 7 KT 2. 0 Ha	1. 7 KT 2. 0 Ha	100%	
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Angka Kematian Ternak	1,7 %	1,5 %	113%	Kabid Peternakan
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeliharaan dan pencegahan penyakit menular ternak	3.000 ekor, 1.500 ekor, 500 ekor, 3.000 ekor, 5 kali	3.000 ekor, 1.500 ekor, 500 ekor, 3.000	100%	

				ekor, 5 kali		
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pengobatan, PKB, Spesimen, Vaksinasi dan Eliminasi	2.000 ekor, 1.000 ekor, 1.000 ekor, 2.500 ekor, 100 ekor, 12 bulan	2.000 ekor, 1.000 ekor, 1.000 ekor, 2.500 ekor, 100 ekor, 12 bulan	100%	
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Angka Penanggulangan serangan OPT dan gangguan usaha perkebunan	100%	100%	97%	Kabid Perkebunan dan Kabid Peternakan
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terkendalnya OPT Perkebunan dan Kebakaran Lahan/Kebun Masyarakat	95 %	93 %	97%	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Tersedianya Obat-obatan untuk Pengendalian OPT secara kimia dan hayati	25 lokasi, 100 Ha	20 Lokasi, 100 Ha	90%	
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Terlaksananya pencegahan, pengendalian kebakaran lahan/ kebun masyarakat dan Sosialisasi PLTB	13 kecamatan	13 kecamatan	100%	
3.27.05.2.01.04	Penanggulangan Bencana Non Alam yang bersifat Zoonosis	Jumlah Dokumen Data Ternak dan Asuransi Ternak	1 dokumen	1 dokumen	100%	
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah STDB untuk petani perkebunan yang diterbitkan	350 STDB	350 STDB	100%	Kabid Saprasi
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya petani pekebun yang mendapatkan STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya)	100 %	100 %	100%	
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Luas lahan yang terinventarisasi STD-B (Surat Tanda Daftar Budidaya)	700 Ha	700 Ha	100%	
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani dan Informasi Sektor Perkebunan/Peternakan	20 %	20%	100%	Kabid Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran

3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1. Meningkatnya Materi Kelembagaan Kelompok Tani dan Informasi Sektor Perkebunan dan Peternakan 2. Tersusunnya Data Komoditi Perkebunan/Peternakan	1). 12 kelompok 2). 1 dokumen	1). 12 kelompok 2). 1 dokumen	100%	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya pertemuan koordinasi penyuluh, terlaksananya pertemuan pembinaan asosiasi kelembagaan petani, terlatihnya kelompok petani	3 kali, 75 orang, 3 asosiasi	3 kali, 75 orang, 3 asosiasi	100%	

Keterangan : OUTCOME dan OUTPUT telah menyesuaikan dengan APBD-P TA 2021 OPD

3.1.3. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

Adanya 2 (dua) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, dalam upaya pencapaiannya memiliki beberapa kendala sebagaimana penjelasan berikut ini:

1. Dalam pencapaian Indikator jumlah produksi komoditi perkebunan yaitu peningkatan produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan, terdapat kendala berupa rendahnya produksi beberapa komoditas srategis. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah meningkatkan teknik budidaya melalui intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman.
2. Untuk indikator bidang peternakan bahwa secara keseluruhan sudah baik dalam mencapai target dan sasaran kinerja, namun perlu sosialisasi yang lebih intensif kepada peternak untuk melakukan pemeriksaan rutin dengan memanfaatkan Tenaga Kesehatan Hewan yang terdapat pada Puskesmas.

3.1.4. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan sub sektor perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada hakekatnya memerlukan ketersediaan sumber daya yang tidak sedikit, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya peralatan maupun sumber daya keuangan (anggaran pembangunan).

Dari segi pemanfaatan sumber daya alam, seperti sumber daya lahan, air, tanaman, plasma nutfah dan lain sebagainya, khususnya dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan, sejauh ini telah dilakukan secara efektif dan efisien melalui berbagai upaya, antara lain dengan cara:

- Melakukan pengembangan sumber benih melalui eksplorasi, identifikasi, penilaian dan penetapan kebun induk terpilih, maupun pohon induk terpilih, inventarisasi kekayaan plasma nutfah tanaman perkebunan, dan lain sebagainya;

- Mengembangkan lahan-lahan yang idle untuk dimanfaatkan sebagai lahan budidaya tanaman perkebunan, melalui upaya perluasan, peremajaan, intensifikasi serta pendukung prasarana perkebunan, seperti pengembangan sumber daya air, optimasi lahan dan irigasi;
- Melakukan pengembangan kaji terap teknologi budidaya perkebunan dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perkebunan;
- Peningkatan kompetensi SDM aparatur perkebunan, dalam rangka meningkatkan kinerja OPD dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, pengembangan benih unggul, pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan, serta pengolahan produk perkebunan.

Dari segi sektor peternakan berdasarkan capaian kinerja tahun 2021 sudah diatas 90% atau sebesar 98,61%. Pencapaian kinerja ini dinilai BAIK. Namun kedepannya perlu dilakukan upaya yang lebih baik lagi.

3.2. REALISASI ANGGARAN (REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH), EFEKTIVITAS ANGGARAN dan EFISIENSI ANGGARAN

3.2.1. REALISASI PENDAPATAN

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga termasuk OPD yang menyumbangkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang bersumber dari Pengelolaan Komoditi Perkebunan dan Peternakan antara lain sebagai berikut:

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A.	Pendapatan Asli Daerah	101.000.000,-	76.343.200,-	75,59
	Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah	101.000.000,-	76.343.200,-	75,59
1	Hasil Penjualan Tanaman	26.000.000,-	32.218.200,-	58,83
2	Hasil Penjualan Hewan	75.000.000,-	44.125.000,-	123,92
Jumlah		101.000.000,-	76.343.200,-	75,59

3.2.2. REALISASI BELANJA DAERAH

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Hibah. Untuk Tahun 2021 Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 8.081.339.529.- (77.13 %) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 10.478.040.001.- dan dapat dilihat pada uraian dalam tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A.	BELANJA DAERAH	10.478.040.001.-	8.081.339.529.-	77.13
I.	Belanja Operasi	10.470.175.201.-	8.079.227.029.-	77.16
1.1	Belanja Pegawai	5.956.605.177.-	4.275.319.740.-	71.77
1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.630.070.024.-	2.948.345.089.-	81.22
1.3	Belanja Hibah	883.500.000.-	855.562.200.-	96.84
II.	Belanja Modal	7.864.800.-	2.112.500.-	26.86
	JUMLAH	10.478.040.001.-	8.081.339.529.-	77.13

Untuk rincian belanja per kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana terinci dibawah ini :

**REALISASI BELANJA DAERAH BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			Rp.	%	
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.506.867.036.-	5.400.334.197.-	71.94	97.13
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	271.147.296.-	267.394.246.-	98.62	99.48
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.604.311.-	40.654.311.-	97.72	99.22
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	79.674.643.-	79.674.643.-	100	100
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.868.342.-	147.065.292.-	98.13	99.21
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.993.105.177.-	4.311.819.740.-	71.95	100
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.806.545.177.-	4.125.259.740.-	71.04	100
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	186.560.000.-	186.560.000.-	100	100
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.319.200.-	37.886.200.-	98.87	100
3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38.319.200.-	37.886.200.-	98.87	100
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	692.439.241.-	318.398.369.-	85.96	96.66
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.667.331.-	7.667.331.-	100	100

3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.097.510.-	66.097.510.-	100	100
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.320.000.-	18.970.000.-	98.19	100
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.780.400.-	25.780.400.-	100	100
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000.-	6.000.000.-	83.33	95
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	566.374.000.-	193.883.128.-	34.23	85
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.018.000.-	180.738.950.-	72.03	88.25
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.798.000.-	2.365.600.-	49.30	71.50
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.820.000.-	55.973.350.-	66.78	93.26
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.400.000.-	122.400.000.-	100	100
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.838.122.-	284.096.692.-	95.63	98.37
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.350.000.-	101.933.320.-	95.85	98.71
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.150.000.-	136.810.250.-	93.61	97.29
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.538.200.-	26.553.200.-	93.04	97.48
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.799.922.-	18.799.922.-	100	100

3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.393.865.996.-	1.237.805.341.-	88.80	99.90
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	681.239.250.-	533.930.041.-	98.07	99.81
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	139.602.500.-	138.103.091.-	98.93	99.88
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	293.456.300.-	283.287.950.-	96.53	99.56
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	248.180.450.-	112.539.000.-	98.77	99.99
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain	712.626.746.-	703.875.300.-	98.77	99.99
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	712.626.746.-	703.875.300.-	98.77	99.99
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	354.230.000.-	330.527.200.-	93.31	99.56
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	354.230.000.-	330.527.200.-	93.31	99.56
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	354.230.000.-	330.527.200.-	93.31	99.56
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	612.809.285.-	595.790.107.-	97.22	98.83
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	612.809.285.-	595.790.107.-	97.22	98.83
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	612.809.285.-	595.790.107.-	97.22	98.83
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	287.758.622.-	230.068.622.-	84.85	93.34

3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	287.758.622.-	230.068.622.-	84.85	93.34
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	77.878.622.-	73.533.622.-	94.42	97.17
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	133.825.000.-	80.480.000.-	60.14	82.85
3.27.05.2.01.04	Penanggulangan Bencana Non Alam yang bersifat Zoonosis	76.055.000.-	76.055.000.-	100	100
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	154.649.529.-	131.254.529.-	84.87	95.46
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	154.649.529.-	131.254.529.-	84.87	95.46
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	154.649.529.-	131.254.529.-	84.87	95.46
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	167.859.533.-	155.559.533.-	92.67	98.19
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	167.859.533.-	155.559.533.-	92.67	98.19
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	167.859.533.-	155.559.533.-	92.67	98.19
	JUMLAH	10.478.040.001.-	8.081.339.529.-	77.13	97.49

Keterangan : OUTCOME dan OUTPUT telah menyesuaikan dengan APBD-P TA 2021 OPD

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Keuangan sebesar **77,13%** (Tujuh puluh tujuh koma tiga belas persen) dan Realisasi fisik sebesar **97,49%** (Sembilan puluh tujuh koma empat puluh sembilan persen), rincian anggaran belanja tahun 2021 tersebut semuanya telah tertuang didalam APBD-P TA 2021.

3.2.3. EFEKTIVITAS ANGGARAN.

Keputusan Mendagri Nomor : 690.900-327 Tahun 1996 mendefinisikan efektivitas diartikan menggambarkan kemampuan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real Dinas.

Tingkat efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja yang telah ditetapkan yang terlihat dalam tabel tingkat efektivitas dihitung pada tahun 2021. **Tingkat Efektivitas** digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:

Tingkat Efektivitas Anggaran	
A	Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti <i>Sangat Efektif</i>
B	Hasil perbandingan tingkat pencapaian 90% sampai 100% berarti <i>Efektif</i>
C	Hasil perbandingan tingkat pencapaian 80% sampai 90% berarti <i>Cukup Efektif</i>
D	Hasil perbandingan tingkat pencapaian 60% sampai 80% berarti <i>Kurang Efektif</i>
E	Hasil perbandingan tingkat pencapaian kurang 60% berarti <i>Tidak Efektif</i>

Dari tabel Total Belanja dan Total Realisasi Belanja Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

No	Jenis Belanja	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A.	BELANJA DAERAH	10.478.040.001.-	8.081.339.529.-	77.13
I.	Belanja Operasi	10.470.175.201.-	8.079.227.029.-	77.16
1.1	Belanja Pegawai	5.956.605.177.-	4.275.319.740.-	71.77
1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.630.070.024.-	2.948.345.089.-	81.22
1.3	Belanja Hibah	883.500.000.-	855.562.200.-	96.84
II.	Belanja Modal	7.864.800.-	2.112.500.-	26.86
	JUMLAH	10.478.040.001.-	8.081.339.529.-	77.13

Tingkat *efektivitas anggaran* belanja Dinas Perkebunan dan Peternakan setelah dihitung berdasarkan tabel diatas sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Tahun 2021	Anggaran Tahun 2021	%	Skor (Penilaian)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3 = ½</i>	<i>4</i>
Rp. 8.081.339.529,-	Rp.10.478.040.001,-	77,13%	Kurang Efektif

3.2.4. EFISIENSI ANGGARAN.

Keputusan Mendagri Nomor : 690.900-327 Tahun 1996 mengelompokkan Efisiensi sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi Anggaran	
A	Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti <i>Tidak Efisien</i>
B	Hasil perbandingan tingkat pencapaian 90% sampai 100% <i>Kurang Efisien</i>
C	Hasil perbandingan tingkat pencapaian 80% sampai 90% berarti <i>Cukup Efisien</i>
D	Hasil perbandingan tingkat pencapaian 60% sampai 80% berarti <i>Efisien</i>
E	Hasil perbandingan tingkat pencapaian kurang 60% berarti <i>Sangat Efisien</i>

Tingkat efisiensi anggaran belanja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan realisasi anggaran sebagai berikut :

Realisasi Anggaran	Total Anggaran/Belanja	%	Skor (Penilaian)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3 = 1/2</i>	<i>4</i>
Rp. 8.081.339.529,-	Rp.10.478.040.001,-	77,13%	Efisien

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja IKU yang disajikan pada tabel di atas, secara keseluruhan diperoleh hasil masing-masing dari ke 2 (dua) indikator kinerjanya tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 yaitu meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dilihat dari realisasi sasaran yaitu diatas 90% atau sebesar 92.28%. Pencapaian kinerja ini dinilai BAIK. Namun untuk kedepannya perlu dilakukan upaya untuk menjadi lebih baik lagi.
2. Sasaran 2 yaitu :
 - Meningkatnya produksi komoditi perkebunan diatas 90% atau sebesar 95,36%. Pencapaian kinerja ini dinilai BAIK. Namun untuk kedepannya perlu dilakukan upaya untuk lebih baik lagi.
 - Meningkatnya populasi ternak diatas 90% (98,61%). Pencapaian kinerja ini dinilai BAIK. Namun kedepannya perlu dilakukan upaya yang lebih baik lagi.

Dari kondisi tersebut diatas dapat ditafsirkan, bahwa masih perlu upaya yang harus dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan produksi komoditi perkebunan secara **kualitatif** dan **kuantitatif** masih dalam target **B (BAIK) Skala 80%-100%**. Sedangkan untuk peningkatan populasi ternak untuk capaian tersebut secara kualitatif dan kuantitatif juga masih dalam target **B (BAIK) Skala 80%-100%** sehingga perlu dipertahankan dan peningkatan yang lebih baik lagi untuk tahun yang akan datang.

Sedangkan untuk Realisasi Keuangan Tahun 2021 sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini sebesar 77.13 % atau sebesar Rp. **8.081.339.529.-** dari total anggaran sebesar Rp. **10.478.040.001.-**. Untuk lebih rinci jenis belanjanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Belanja	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A.	BELANJA DAERAH	10.478.040.001.-	8.081.339.529.-	77.13
I.	Belanja Operasi	10.470.175.201.-	8.079.227.029.-	77.16
1.1	Belanja Pegawai	5.956.605.177.-	4.275.319.740.-	71.77
1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.630.070.024.-	2.948.345.089.-	81.22
1.3	Belanja Hibah	883.500.000.-	855.562.200.-	96.84
II.	Belanja Modal	7.864.800.-	2.112.500.-	26.86
	JUMLAH	10.478.040.001.-	8.081.339.529.-	77.13

Dari realisasi belanja Tahun 2021 diatas dapat kita simpulkan tingkat Efektifitas dan Efisiensi Anggaran sebagai berikut :

- Efektivitas Anggaran

Realisasi Anggaran Tahun 2021	Anggaran Tahun 2021	%	Skor (Penilaian)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3 = ½</i>	<i>4</i>
Rp. 8.081.339.529,-	Rp.10.478.040.001,-	77,13%	Kurang Efektif

- Efisiensi Anggaran

Realisasi Anggaran Tahun 2021	Total Anggaran Tahun 2021	%	Skor (Penilaian)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3 = 1/2</i>	<i>4</i>
Rp. 8.081.339.529,-	Rp.10.478.040.001,-	77,13%	Efisien

Dari gambaran hasil pengukuran Tahun 2021 tersebut diatas, untuk efektivitas anggaran memang masih kurang efektif karena realisasi anggaran yang hanya mencapai 77.13 % namun untuk realisasi fisik kegiatan mencapai 97.49 %. Hal ini tentunya secara efisiensi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan mencapai tingkat efisien. Sehingga secara keseluruhan masih diperlukan adanya optimalisasi untuk

realisasi anggaran kedepannya sehingga tentunya capaian fisik kegiatan lebih baik lagi. Selain itu untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja secara optimal maka seluruh jajaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan lebih bekerja lebih giat lagi sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Kuala Tungkal,

Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Fauziah, S.Pt

Pembina Tk. I

NIP. 19680205 199703 2 003

LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN BIDANG PETERNAKAN TAHUN 2021

KEGIATAN DILAPANGAN PADA SAAT PENDISTRIBUSIAN SAPI HIBAH PADA KELOMPOK TANI



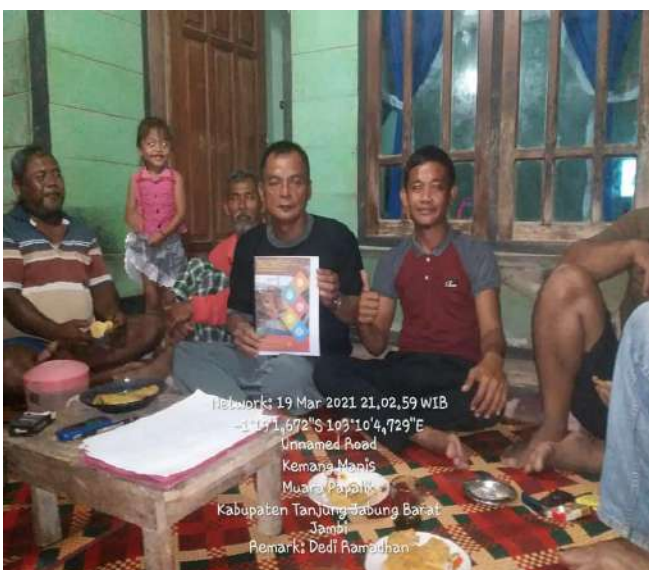
KEGIATAN DILAPANGAN
PADA SAAT PELAKSANAAN ELIMINASI, PENGAMBILAN SPESIMEN, VAKSINASI DAN PENGOBATAN



KEGIATAN DILAPANGAN
PADA SAAT PELAKSANAAN INSEMINASI BUATAN (IB) DAN PANEN PEDET



KEGIATAN ASURANSI TERNAK, PENGELOLAAN TERNAK, PERTEMUAN PELAKU USAHA PETERNAKAN DAN PENGECEKAN HEWAN QURBAN



DOKUMENTASI KEGIATAN BIDANG PERKEBUNAN TAHUN 2021

**KEGIATAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN SECARA KIMIA DAN HAYATI
(UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN)**



KEGIATAN PEMELIHARAAN KEBUN PERCONTOHAN KELAPA SAWIT DAN KOPI LIBTUKOM



**KEGIATAN PEMELIHARAAN KEBUN PERCONTOHAN KELAPA SAWIT DAN KOPI LIBTUKOM
KEGIATAN PENANGANAN, PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN LAHAN/KEBUN
DAN BLOK PENGHASIL TINGGI (BPT)**



DOKUMENTASI KEGIATAN BIDANG PRASARANA SARANA TAHUN 2021

KEGIATAN HIBAH BANTUAN SENG UNTUK LANTAI JEMUR



KEGIATAN HIBAH BANTUAN PIPA PARALON UNTUK TATA AIR MIKRO DAN PEMBERIAN KELAYAKAN TEKNIS UNTUK PENERBITAN STDB



DOKUMENTASI KEGIATAN BIDANG PENYULUHAN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN TAHUN 2021

KEGIATAN PERTEMUAN KOORDINASI PENYULUH DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN



KEGIATAN PELATIHAN SKE DAN PERTEMUAN KOORDINASI PENYULUH

